

Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi

Erna Delita¹, Rina Andriani², M. Irwan³

¹⁻³Universitas Islam Kuantan Singingi, Riau, Indonesia

Email Corresponding: ernadelita14@gmail.com

Article History

Received: 14-07-2024

Revision: 15-07-2024

Accepted: 23-07-2024

Published: 31-07-2024

Abstract. This study examines the cash expenditure accounting system at the Pangean Sub-District Office, Kuantan Singingi Regency, in compliance with Ministerial Regulation No. 77 of 2020. The findings reveal that the documents and procedures used, such as SPD, SPP, SPM, SP2D, and Transfer Receipts, align with the regulations. The implemented procedures reflect good financial governance principles, including accountability, transparency, and efficiency. These findings indicate that the Pangean Sub-District Office has successfully managed cash expenditures transparently and accountably, serving as a model for other government institutions. Recommendations include staff training enhancement, periodic evaluation, IT development, and routine internal audits.

Keywords: accounting system, cash expenditure, financial governance, Permendagri 77/2020, accountability.

Abstrak. Penelitian ini membahas sistem akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen dan prosedur yang digunakan, seperti SPD, SPP, SPM, SP2D, dan Bukti Transfer, telah sesuai dengan regulasi. Prosedur yang diterapkan mencerminkan prinsip tata kelola keuangan yang baik, termasuk akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Temuan ini menunjukkan bahwa Kantor Camat Pangean telah berhasil mengelola pengeluaran kas secara transparan dan akuntabel, yang dapat dijadikan model bagi institusi pemerintah lainnya. Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan pelatihan staf, evaluasi berkala, pengembangan teknologi informasi, dan audit internal rutin.

Kata Kunci: sistem akuntansi, pengeluaran kas, tata kelola keuangan, Permendagri 77/2020, akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan elemen penting bagi organisasi, baik sektor publik maupun swasta, untuk menyampaikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pihak internal maupun eksternal (Zeff, 2013). Dalam lingkup pemerintahan, penyusunan laporan keuangan harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku, seperti yang telah ditetapkan oleh Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 (Daerah et al., 2011). Standar ini menjadi panduan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, otonomi daerah yang diatur dalam kerangka desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan (Mardiasmo, 2021).

Kas sebagai salah satu komponen keuangan memainkan peran penting dalam mendukung

pelaksanaan program pembangunan daerah (Inggriani et al., 2021). Pengelolaan kas yang baik tidak hanya memastikan kelancaran operasional instansi pemerintah, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan yang berbasis data serta indikator transparansi dan akuntabilitas publik (Oktaviani, 2020). Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Albugis, 2016), menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar mampu meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di sektor pemerintahan. Sementara itu, penelitian oleh (Albugis, 2016) dan (Rondonuwu et al., 2015) mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengelolaan keuangan daerah adalah rendahnya pemahaman dan implementasi standar akuntansi pada tingkat operasional. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi secara berkala terhadap sistem pengelolaan keuangan, khususnya pengelolaan kas, untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.

Kantor Camat Pangean di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu organisasi sektor publik yang bertugas menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat kecamatan. Pengelolaan kas di kantor ini sangat penting untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik serta mencapai visi dan misinya. Namun, sejauh ini, penelitian tentang implementasi sistem akuntansi pengeluaran kas di tingkat kecamatan, khususnya berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, masih sangat terbatas. Gap ini diperkuat oleh studi (Masanae et al., 2022) dan (Sabu et al., 2023), yang menemukan bahwa meskipun regulasi telah diterbitkan, implementasi di tingkat kecamatan masih sering menghadapi kendala seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan minimnya pengawasan. Padahal, kecamatan memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan fokus pada analisis sistem akuntansi pengeluaran kas di Kantor Camat Pangean berdasarkan regulasi terbaru, yaitu Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas sistem akuntansi dalam mendukung pengelolaan keuangan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi instansi pemerintah lainnya dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, terutama pada tingkat kecamatan. Dengan adanya studi ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap literatur akuntansi sektor publik, sekaligus menjadi acuan praktis bagi pembuat kebijakan dan pelaksana teknis di lingkungan pemerintah daerah.

METODE

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk menggambarkan dan memahami variabel secara mandiri tanpa membuat perbandingan antar variabel atau mencari hubungan kausalitas (Thomann et al., 2022). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang sistem akuntansi pengeluaran kas di Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan regulasi yang berlaku.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, yang beralamat di Jl. Agus Salim No. 79 Pangean. Pelaksanaan penelitian berlangsung selama enam bulan dimulai dari Februari 2024.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Camat Pangean, yang berjumlah 10 orang. Dari populasi tersebut, dipilih tiga orang sebagai sampel penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling (Thomas, 2022). Sampel yang dipilih terdiri dari:

1. Kepala Camat
2. Sekretaris
3. Bendahara

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara dan observasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan keuangan, dan sumber-sumber lain yang relevan (Johnston, 2014). Kombinasi kedua jenis data ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas di Kantor Camat Pangean.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara: Peneliti melakukan wawancara langsung dengan Kepala Camat, Sekretaris, dan Bendahara untuk mendapatkan informasi mendalam terkait sistem akuntansi pengeluaran kas.
2. Dokumentasi: Pengumpulan data dari dokumen-dokumen resmi, seperti laporan keuangan, prosedur akuntansi, dan peraturan terkait, guna memperkuat hasil wawancara.
3. Observasi: Pengamatan langsung terhadap proses pengelolaan pengeluaran kas di Kantor Camat Pangean untuk memahami implementasi sistem akuntansi secara praktis.

Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan sistem akuntansi pengeluaran kas serta mengidentifikasi kesesuaian antara praktik yang dilakukan dengan regulasi yang berlaku, khususnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Teknik Analisis Data

1. Mengumpulkan dan menganalisis data yang telah diperoleh dan mengklarifikasi sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.
2. Analisis data yang diperoleh yaitu dari proses sistem akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean, fungsi-fungsi yang terkait, jaringan, prosedur dan dokumen-dokumen yang digunakan, unsur-unsur sistem akuntansi oleh Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Data yang diperoleh dari wawancara, maupun analisis dokumen diverifikasi melalui perbandingan data yang diperoleh dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Tujuan dilakukan langkah ini adalah untuk mengetahui dan memastikan bagaimana sistem akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean.
3. Hasil dari analisis data ini akan dibandingkan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 untuk mengetahui kesesuaian atau tidak sesuai dengan beberapa pengeluaran secara umum dengan praktek yang terjadi pada Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Memberikan kesimpulan atas hasil pembahasan. Apabila hasil analisa masih banyak perbedaan-perbedaan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, maka peneliti akan

memberikan saran atau masukan yang diperlukan.

HASIL

Dokumen Yang Digunakan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Surat Penyediaan Dana (SPD)

Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap sebagai dasar penerbitan SPP (Surat Perintah Pembayaran)

2. Surat Perintah Pembayaran (SPP)

Surat Perintah Pembayaran disingkat dengan SPP merupakan dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

3. Surat Perintah Membayar (SPM)

Surat Perintah Membayar disingkat dengan SPM merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran selaku BUD yang digunakan sebagai dasar pencairan dana berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM). SPM merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D).

4. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Surat Perintah Pencairan Dana disingkat dengan SP2D merupakan dokumen yang diterbitkan oleh SKPKD untuk mencairkan uang pada PT. Bank Riau Kepri yang merupakan bukti penerimaan kas bagi OPD yang menerima SP2D tersebut, sebaliknya merupakan bukti pengeluaran kas bagi kantor kas daerah.

5. Bukti Transfer

Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti transaksi pengeluaran kas daerah.

Perbandingan Dokumen Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada Kantor Camat Pangean Dengan Permendagri

Tabel 1. Perbandingan Mengenai Dokumen yang digunakan pada Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada Kantor Camat Pangean menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Jaringan Prosedur	Praktek		Keterangan
	Sesuai	Tidak Sesuai	
Surat Penyediaan Dana (SPD)	√		Kantor Camat Pangean menggunakan SPD untuk menunjukkan tersedianya dana untuk diserap dan sebagai prosedur untuk penerbitan SPP.
Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	√		Kantor Camat Pangean menggunakan SPP untuk mengajukan permintaan pembayaran oleh bendahara pengeluaran.

Surat Perintah Membayar (SPM)	√	Kantor Camat Pangean menggunakan SPM untuk menerbitkan SP2D.
Surat Perintah Pencairan (SP2D)	√	Kantor Camat Pangean menggunakan SP2D untuk mencairkan uang di bank.
Bukti Transfer	√	Kantor Camat Pangean menggunakan Bukti Transfer Bank untuk dokumen transfer pengeluaran daerah.

Kantor Camat Pangean dengan Pemendagri No.77 Tahun 2020 dapat dilihat bahwa dokumen yang digunakan dalam system akuntansi pengeluaran kas yang ada di Kantor Camat Pangean telah sesuai dengan Pemendagri No. 77 Tahun 2020.

Sistem akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean telah menggunakan ke 5 dokumen yaitu Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Bukti Transfer.

Dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Juliandi bagian bendahara pengeluaran pada tanggal 25 Juli 2024 yang menyatakan bahwa: "Dalam melakukan prosedur sistem akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean, dokumen yang untuk sistem akuntansi pengeluaran kas kantor camat menggunakan 5 dokumen yaitu Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Bukti Transfer.

Prosedur Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas

Prosedur dalam Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Penerbitan SPD

Prosedur penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) dalam system akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

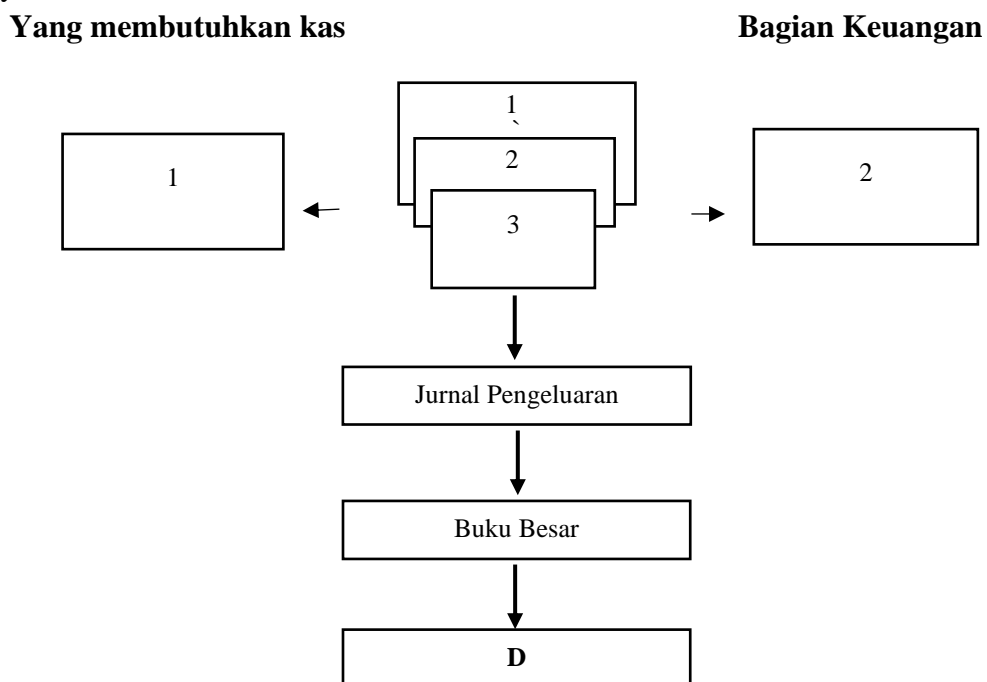
- a. Setelah menetapkan anggaran kas/rencana kebutuhan OPD dan anggaran pada Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) untuk menerbitkan SPD
- b. Menerima draft SPD yang telah diverifikasi dan diparaf untuk melakukan pengecekan ulang, jika terdapat koreksi akan dikembalikan, jika disetujui akan diparaf dan diteruskan.
- c. Menerima SPD yang telah ditandatangani untuk diserahkan kepada Pengelola Kas Daerah.
- d. SPD yang telah diterima disimpan sebagai dokumen atau arsip bagi pihak yang menerimanya.

2. Prosedur Pengajuan SPP

Prosedur pengajuan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) dalam system akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Bendahara pengeluaran mempersiapkan dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya.

- b. Bendahara pengeluaran kemudian mencocokkan SPP agar dapat ditandatangani dan diserahkan kepada PPK-OPD.
 - c. Kemudian pengajuan SPP dilampin dengan daftar rincian penggunaan dana sampai dengan jenis belanja
3. Prosedur Penerbitan SPM
- Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) dalam system akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:
- a. Setelah dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah, kemudian pengguna anggaran/kuasa anggaran menerbitkan SPM
 - b. Membuat rancangan SPM atas SPP yang telah diuji kelengkapannya untuk diajukan ke pengguna anggaran.
 - c. Membuat register SPM.
4. Prosedur Penerbitan SP2D
- Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana dalam system akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai Berikut:
- a. Menerima dan meneliti berkas pencairan anggaran berdasarkan dokumen SPM.
 - b. Setelah dinyatakan lengkap maka akan dilakukan pencetakan SP2D.
 - c. Menerima SP2D yang telah diterbitkan oleh BUD untuk diserahkan agar dapat diproses selanjutnya.
6. Prosedur Penerbitan SPJ Pengeluaran
- Prosedur penerbitan Surat Pertanggung Jawaban Pengeluaran dalam sistem akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean adalah bendahara pengeluaran secara administratif wajib mempertanggungjawabkan uang persediaan / ganti uang/ tambah uang persediaan (UP/GU/TU) kepada Kepala OPD melalui PPK-OPD paling lambat 10 bulan berikutnya.



Gambar 1. Prosedur Pengeluaran Kas Kantor Camat Pangean
Sumber: Kantor Camat Pangean

Perbandingan Prosedur Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Dengan Pemandagri

Tabel 2. Perbandingan Mengenai Prosedur Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas pada Kantor Camat Pangean menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Jaringan Prosedur	Praktek		Keterangan
	Sesuai	Tidak Sesuai	
Prosedur Penerbitan SPD a. Meneliti draf SPD yang diajukan BUD b. Melakukan otorisasi SPD	√		Pengelola menerima dokumen anggaran kas setelah SPD diterbitkan oleh pejabat pengelola keuangan daerah maka akan diposes penerbitan SPP
Prosedur pengajuan SPP a. Mempersiapkan dokumen SPP beserta lampirannya b. Mengajukan SPP kepada PPK-OPD c. Prosedur penerbitan SPM d. Mengotorisasi dan menerbitkan SPM e. Mengotorisasi surat penolakan SPM yang diterbitkan PP-OPD bila SPP yang diajukan bendahara OPD tidak lengkap	√		Bendahara menerima dokumen dan dilakukan proses penerbitan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran setelah dokumen SPP dinyatakan lengkap dan sah maka pengguna anggaran akan menerbitkan SPM.
Prosedur penerbitan SP2D bendahara pengeluaran OPD memiliki tugas mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan	√		Petugas loket BPKAD menerima berkas dan akan dibuatkan register penerimaan SPM, setelah semua sudah sesuai maka akan dilanjutkan penerbitan SP2D sesuai dengan SPM.
Prosedur penerbitan SPJ bendahara pengeluaran secara administrative wajib mempertanggungjawabkan (UP/GU/TU)	√		Setelah semuanya selesai dan lengkap, maka bendahara akan menerbitkan SPJ yang telah ditandatangani dan akan diserahkan kepada BPKAD selaku PPK-OPD untuk diverifikasi keasliannya.

Hasil perbandingan prosedur sistem akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean dengan kajian teori Permendagri Nomor 77 tahun 2020 dapat dilihat bahwa system

akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean telah sesuai dengan dengan teori Pemendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Sistem akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean sudah menggunakan ke 5 prosedur sistem akuntansi pengeluaran kas yaitu prosedur penerbitan SPD, Prosedur Pengajuan SPP, Prosedur Penerbitan SPM, Prosedur Penerbitan SP2D, dan Prosedur Penerbitan SPJ.

Dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan Juliandi bagian Bendahara pengeluaran pada tanggal 25 Juli 2024 yang menyatakan bahwa "Dalam melakukan prosedur sistem pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean, prosedur yang digunakan ada 5 yaitu prosedur penerbitan SPD, prosedur pengajuan SPP, prosedur penerbitan SPP, prosedur penerbitan SPM, prosedur penerbitan SP2D, dan prosedur penerbitan SPJ".

DISKUSI

Diskusi mengenai sistem akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi menyoroti kesesuaian antara praktik yang diterapkan dengan regulasi yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Penelitian ini menunjukkan bahwa dokumen dan prosedur yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini mencerminkan bahwa Kantor Camat Pangean telah mengimplementasikan sistem pengeluaran kas yang memadai untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Dokumen utama yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas meliputi Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), dan Bukti Transfer. Setiap dokumen ini memiliki peran spesifik dalam proses pengelolaan keuangan. Misalnya, SPD berfungsi untuk memastikan ketersediaan dana, sedangkan SPM dan SP2D digunakan untuk mencairkan dana dari kas daerah ke rekening pihak penerima. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh (Arifianti, 2013) dan (Agustin et al., 2020), bahwa penggunaan dokumen keuangan yang tepat adalah kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan sesuai dengan peraturan.

Dalam konteks prosedur, Kantor Camat Pangean juga telah menjalankan lima prosedur utama, yaitu penerbitan SPD, pengajuan SPP, penerbitan SPM, penerbitan SP2D, dan penerbitan Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Setiap prosedur ini menunjukkan adanya koordinasi dan verifikasi yang ketat antara berbagai pihak terkait, seperti Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dan Pengguna Anggaran. Misalnya, pada prosedur penerbitan SP2D, dokumen SPM diverifikasi oleh PPKD sebelum pencairan dana dilakukan. Langkah ini penting untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana, sebagaimana diungkapkan oleh (Rohmah et al., 2020) dalam kajian tentang kontrol internal dalam sistem keuangan daerah.

Kesesuaian praktik di Kantor Camat Pangean dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 juga mengindikasikan bahwa institusi ini telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi tercermin dalam pelaksanaan prosedur yang mendetail dan terdokumentasi dengan baik. Sebagaimana diungkapkan oleh (Albugis, 2016) dan (Hendri & Erinos, 2020), penerapan sistem keuangan daerah yang berbasis pada regulasi akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran oleh pemerintah daerah.

Hasil wawancara dengan Juliandi, Bendahara Pengeluaran di Kantor Camat Pangean, pada tanggal 25 Juli 2024, memperkuat temuan ini. Beliau menjelaskan bahwa prosedur dan dokumen yang digunakan telah mencakup seluruh aspek yang diatur dalam regulasi. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen pihak terkait untuk mematuhi peraturan. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi World Bank (Kilby & McWhirter, 2022) bahwa kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah adalah elemen penting dalam meningkatkan kapasitas manajerial pemerintahan lokal.

Secara keseluruhan, studi ini menyimpulkan bahwa sistem akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean telah sesuai dengan teori dan praktik terbaik yang diatur dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Temuan ini dapat menjadi contoh bagi kantor pemerintahan lain dalam mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel, serta memberikan kontribusi positif terhadap upaya meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah di Indonesia.

KESIMPULAN

Sistem akuntansi pengeluaran kas pada Kantor Camat Pangean Kabupaten Kuantan Singingi telah berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Penggunaan dokumen seperti SPD, SPP, SPM, SP2D, dan Bukti Transfer serta pelaksanaan prosedur terkait menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik. Hal ini mencerminkan komitmen institusi dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas sistem akuntansi pengeluaran kas di Kantor Camat Pangean, disarankan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan teknis terkait pengelolaan keuangan daerah akan sangat membantu dalam memastikan konsistensi dan kepatuhan terhadap regulasi. Kedua, evaluasi rutin terhadap implementasi prosedur dan dokumen yang digunakan perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kendala serta peluang peningkatan efisiensi. Ketiga, pengadopsian teknologi informasi, seperti sistem elektronik berbasis SIPKD yang terintegrasi, dapat mempercepat proses pengelolaan dokumen, meningkatkan akurasi data, dan meminimalkan risiko kesalahan. Selain itu, audit internal secara berkala perlu diterapkan untuk mengawasi kepatuhan dan meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan sistem keuangan. Langkah-langkah ini diharapkan tidak hanya memperkuat tata kelola di tingkat kecamatan tetapi juga menjadi model penerapan praktik terbaik bagi institusi pemerintah daerah lainnya.

REFERENSI

- Agustin, R., Irwan, M., & Andriani, R. (2020). Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Kantor Camat Benai Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Ekonomi Al-Khitmah*, 2(2), 33–50.
- Albugis, F. F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(3).
- Arifianti, H. (2013). *Pengaruh Pemeriksaan dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. UNS (Sebelas Maret University).

- Daerah, P. K., Pemerintah, S. A., Melakukan, P. T. K. N. U., & LKPD, A. A. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*(2011). Jakarta.
- Hendri, M., & Erinos, N. R. (2020). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, implementasi sistem informasi manajemen daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2479–2493.
- Inggriani, Y., Yulis, Y. E., & Diskhamarzeweny, D. (2021). Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan Kas Dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Internal Pada Klinik Utama Malikha Teluk Kuantan. *JURNAL EKONOMIAL-KHITMAH*, 3(2), 55–70.
- Johnston, M. P. (2014). Secondary data analysis: A method of which the time has come. *Qualitative and quantitative methods in libraries*, 3(3), 619–626.
- Kilby, C., & McWhirter, C. (2022). The World Bank covid-19 response: Politics as usual? *The review of international organizations*, 1–30.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & manajemen keuangan daerah: edisi terbaru*. Penerbit Andi.
- Masanae, W., Morasa, J., & Budiarmo, N. S. (2022). Evaluasi penerapan sistem pengendalian internal pengeluaran kas pada Kantor Kecamatan Malalayang Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum)*, 5(2), 243–252.
- Oktaviani, S. (2020). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH, PEMAHAMAN AKUNTANSI, KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN, DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Sin. *JUHANPERAK*, 1(2), 484–494.
- Rohmah, L., Askandar, N. S., & Sari, A. F. K. (2020). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 9(05).
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2015). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Sabu, F., Saerang, D. P. E., & Afandi, D. (2023). EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENGELUARAN KAS PADA KANTOR KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 11(3), 191–202.
- Thomann, E., Ege, J., & Paustyan, E. (2022). Approaches to Qualitative Comparative Analysis and good practices: A systematic review. *Swiss Political Science Review*, 28(3), 557–580.
- Thomas, F. B. (2022). The role of purposive sampling technique as a tool for informal choices in a social Sciences in research methods. *Just Agriculture*, 2(5), 1–8.
- Zeff, S. A. (2013). The objectives of financial reporting: a historical survey and analysis. *Accounting and Business Research*, 43(4), 262–327.